

POLITIK UANG SEBAGAI MODAL EKONOMI CALEG DI PILEG 2024 DI KOTA SURABAYA

Kartuji

adjieaksaraband@gmail.com

Universitas Terbuka

ABSTRAK

Tulisan berikut ini akan mengupas atau membahas tentang Money Politic atau Politik Uang pada Pemilihan Legislatif atau Pileg tahun 2024 di Kota Surabaya. Menurut beberapa teori mengatakan bahwasannya Pemilihan Umum tidak bisa di pisahkan dari yang namanya modal ekonomi. Dan modal ekonomi itu lah yang sering di gunakan oleh banyak orang untuk mencalonkan diri menjadi seorang Caleg atau calon anggota legislati di Kota Surabaya, tentunya untuk memenangkan Pemilihan Umum. Akan tetapi politik uang yang terjadi ini bertentangan dan menciderai adanya prinsip umum Pemilu yaitu LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia) serta JURDIL (Jujur Adil). Tetapi politik uang ini nyata – nyata terjadi pada Pemilu di Kota Surabaya di dukung dengan adanya beberapa kasus temuan di lapangan para Caleg (Calon Legislatif) yang memenangkan pemilihan legislatif itu menggunakan modal yang sangat besar. Dan yang menarik adalah banyak para anggota legislatif yang telah duduk di DPRD Kota Surabaya atau istilahnya INCUMBENT, kalah dengan para Caleg pendatang baru yang menggunakan kekuatan modal ekonominya. Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah untuk bagaimana mengetahui secara umum terkait dengan taktik dan praktik Money Politic yang ada di Pileg tahun 2024 di Kota Surabaya, dan berikut membahas terkait persepsi masyarakat, dampak politik uang terhadap tatanan demokrasi, modalitas Caleg, praktek politik uang berdasarkan laporan warga, dan peran masyarakat dalam menanggulangi politik uang. Penelitian ini menggunakan teori Money Politic dari Mada Sukmajati dan Edward Aspinall mengenai Politik uang Indonesia pada pemilu legislatif 2014. Mada Sukmajati dan Edward Aspinall mengidentifikasi beberapa jenis teori dan praktek terkait politik uang di Indonesia antara lain (Teori Patronase dan Klientelisme, Teori Kapitalisasi Politik, Teori Rasionalitas Pemilih, Teori Ekonomi Politik Pemilu, Teori Institusionalisme, Teori Perilaku Elit). Temuan di lapangan mengatakan bahwa dari teori yang di kemukakan oleh Mada Sukmajati dan Edward Aspinall yang salah satunya adalah pemanfaatan biaya atau dana publik untuk keperluan elektoral (pork barrel politic), tetapi nyatanya masih kalah menarik dari yang namanya teori pembelian suara (vote buying) atau istilahnya serangan fajar. Oleh sebab itu pemberantasan politik uang perlu dilakukan secara serius oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, LSM, dan masyarakat sipil, bila perlu instansi pendidikan juga perlu di libatkan guna menjaga integritas dan kesehatan demokrasi di Kota Surabaya.

Kata Kunci: Pemilu Legislatif – Money Politic – Kota Surabaya - Modalitas Ekonomi Politik.

PENDAHULUAN

Politik uang telah menjadi isu yang mendalam dan kompleks dalam konteks demokrasi, terutama di tengah masyarakat yang tengah berjuang untuk membangun dan memelihara sistem demokratis yang sehat. Dan masyarakat Kota Surabaya, sebagai salah satu pusat politik dan ekonomi di Indonesia, tidak luput dari dampak politik uang dalam proses politiknya.

Terkait persoalan politik uang yang terjadi pada pemilu di Surabaya, dan sebenarnya terjadi juga di banyak daerah di negara Indonesia, tentunya ini terjadi karena sebab atau faktor yang saling erat berhubungan satu sama lain. Antara lain ialah kandidat yang bertarung dalam kontestasi pemilu merasa mereka perlu memberikan uang kepada pemilih

untuk mendapatkan dukungan. Hal ini karena disebabkan persaingan yang ketat, kurangnya popularitas kandidat, atau keinginan untuk memastikan kemenangan. Di tambah lagi banyaknya kantong – kantong wilayah dengan kategori tingkat ekonomi yang lemah, disitulah pemilih lebih rentan terhadap politik uang karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Dan banyak juga partai politik atau tim sukses kampanye melihat politik uang sebagai strategi yang paling efektif untuk memobilisasi dukungan, terutama di wilayah dengan persaingan yang ketat atau dengan basis pemilih yang besar namun heterogen.

Penelitian terkait tentang "Politik Uang sebagai Modal Ekonomi Caleg di Pileg 2024 di Kota Surabaya" sangat penting dan mendesak untuk di lakukan tentunya dengan berbagai pertimbangan antara lain, politik uang akan merusak integritas demokrasi dan Pemilu seharusnya menjadi mekanisme untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas, visi, dan program kerja. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang praktik politik uang dan dampaknya. Dengan mengungkap bagaimana politik uang digunakan sebagai modal ekonomi oleh calon legislatif, masyarakat dan pemilih bisa lebih waspada dan kritis terhadap fenomena ini.

Dan mengapa menggunakan Teori dari Mada Sukmajati dan Edward Aspinall?, teori politik Mada Sukmajati dan Edward Aspinall memberikan kerangka yang relevan dan kontekstual untuk memahami politik uang di Indonesia. Kedua ahli ini telah mengkaji secara mendalam bagaimana politik uang beroperasi dalam konteks pemilu di Indonesia, termasuk pada Pemilu Legislatif 2014. Sukmajati dan Aspinall menawarkan analisis yang komprehensif tentang bentuk-bentuk, motif, dan implikasi politik uang di Indonesia. Dengan menggunakan teori dari Mada Sukmajati dan Edward Aspinall, penelitian tentang politik uang di Pileg 2024 di Kota Surabaya akan memiliki landasan teoritis yang kuat dan relevan, memungkinkan analisis yang mendalam dan kontekstual.

Berikut adalah 5 (lima) penelitian sebelumnya yang juga berfokus pada topik politik uang di Indonesia, Mada Sukmajati (2014) - "Money Politics in Legislative Elections in Indonesia", penelitian ini mengeksplorasi praktik politik uang dalam pemilu legislatif di Indonesia, dengan fokus pada pemilu 2014. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2016) - "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots", buku ini mengkaji berbagai aspek politik uang di Indonesia, termasuk bagaimana uang digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilu di tingkat local. Burhanuddin Muhtadi (2019) - "Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery", penelitian ini fokus pada mekanisme pembelian suara di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilu. Yoes C. Kenawas (2018) - "Money Politics and Electoral Corruption in Indonesia: The Role of Candidates and Voters", studi ini membahas peran kandidat dan pemilih dalam praktik politik uang di Indonesia. Rini Astuti (2019) - "The Political Economy of Vote Buying in Indonesia's

Local Elections", penelitian ini menyoroti aspek ekonomi politik dari pembelian suara dalam pemilu lokal di Indonesia. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang praktik politik uang di Indonesia, mekanismenya, serta dampaknya terhadap demokrasi dan proses pemilihan.

Sementara itu yang menjadi pembeda penelitian saya dengan penelitian – penelitian serupa yang membahas politik uang di Indonesia adalah, Konteks Waktu, sebagian besar penelitian ini dilakukan pada Pemilu 2014, dengan beberapa penelitian berfokus pada Pemilu 2014 dan periode sebelumnya. Konteks Geografis, penelitian ini mengeksplorasi politik uang khusus yang terjadi di Kota Surabaya. Pendekatan dan Perspektif, yaitu menyoroti politik uang sebagai modal ekonomi bagi caleg. Ini menekankan bagaimana caleg menggunakan uang tidak hanya untuk membeli suara tetapi juga sebagai investasi

dalam modal ekonomi mereka untuk jangka panjang. Tujuan Penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana politik uang digunakan sebagai modal ekonomi oleh caleg di Surabaya dalam konteks Pileg 2024, dengan fokus pada strategi, implementasi, dan hasilnya.

Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi baik dan signifikan terhadap literatur yang ada tentang politik uang di Indonesia, terutama dengan memberikan fokus yang mendalam pada konteks lokal dan spesifik di Surabaya pada Pemilu 2024.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif eksploratif yang akan menampilkan data yang sebenarnya tanpa proses manipulasi. Dengan pendekatan studi kasus di daerah pemilihan atau Dapil 2 Kota Surabaya. Dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku masyarakat dari perspektif partisipan.

Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang fleksibel, dan mempertimbangkan etika penelitian, serta dapat mengungkap aspek-aspek penting yang mungkin terabaikan oleh pendekatan kuantitatif. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan luas dan berkontribusi pada formulasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi politik uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik uang di Surabaya pada pemilu 2024 tetap akan menjadi isu yang signifikan. Meski penerimaan uang dari Caleg kepada masyarakat masih terjadi, dampaknya terhadap hasil pemilu tidak sebesar yang diperkirakan. Survei menunjukkan bahwa hanya 17,2% masyarakat yang pasti memilih calon yang memberi uang, sementara banyak yang menerima uang tetapi tetap memilih sesuai kehendak mereka.

Money Politic yang terjadi di Kota Surabaya juga sudah cukup menjadi permasalahan yang sangat serius, hal ini terjadi karena hampir dilakukan oleh semua Calon Legislatif atau Caleg. Hal ini diperkuat oleh statement pengamat politik yang sudah melakukan penelitian tentang modalitas seorang Caleg yang sangat besar. Kisaran rata – rata modal yang harus disiapkan oleh seorang Caleg adalah sebesar:

- Caleg DPR RI : Antara Rp 5 miliar – Rp 10 miliar.
- Caleg DPRD Provinsi : Antara Rp 3 miliar – Rp 5 miliar
- Caleg DPRD kabupaten/kota : Antara Rp 1,5 miliar – Rp 3 miliar

Dana atau modal yang tersebut di atas di antaranya di alokasikan oleh para Caleg untuk antara lain :

1. Akomodasi ke daerah pemilihan, selama proses masa kampanye, setidaknya para caleg akan mengunjungi daerah pemilihan minimal 1 bulan 2 kali. Selama kegiatan tersebut, caleg pasti akan mengeluarkan banyak biaya untuk kebutuhan transportasi, penginapan, akomodasi dan makan, yang jumlahnya bisa melebihi perencanaan pertama.
2. Biaya Kampanye, adalah biaya seperti menyiapkan logistik, atribut partai berupa kaos, spanduk, umbul-umbul, baliho, iklan, dan kegiatan promosi lainnya. Yang tujuannya jelas untuk meningkatkan branding si caleg itu sendiri.
3. Bantuan Sosial, untuk mendapat perhatian dari masyarakat setempat, tak sedikit caleg mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan sosial di dapil setempat. Salah satu contoh adalah memperbaiki jalan, renovasi musholla, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

4. Alokasi lain yang menyerap biaya adalah pengumpulan massa. Pengumpulan massa ini biasanya terjadi pada putaran terakhir masa kampanye. Pada saat ini, biasanya caleg akan mengumpulkan tim suksesnya untuk melakukan orasi terakhir sebelum minggu tenang.

Dalam giat ini biasanya seorang caleg mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya akomodasi tim suksesnya, biaya Saksi. Biasanya caleg membayar para saksi di setiap TPS. Umumnya, bayaran setiap saksi berkisar Rp. 200.000.- hingga Rp.300.000.- per orang.

5. Dan yang paling fenomenal adalah alokasi untuk senjata utama dalam menarik minat pemilih untuk kemudian di harapkan memilih seorang Caleg dengan cara Serangan Fajar. Biaya politik yang dikenal juga sebagai "serangan fajar" adalah praktik di mana calon legislatif melakukan kampanye secara intensif di pagi hari atau pada saat beberapa hari menjelang hari pemilihan dengan tujuan membangun kesadaran atau mengejutkan pemilih dengan pesan-pesan kampanye mereka. Biaya untuk melaksanakan serangan fajar dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk wilayah geografis kampanye, tingkat persaingan, jenis media yang digunakan, dan jumlah pemilih yang ditargetkan. Namun untuk wilayah kota Surabaya kisaran yang umum adalah sebesar Rp. 50.000.- sampai Rp. 150.000.- per orang atau pemilih. Jadi dapat di bayangkan berapa nominal yang harus di keluarkan khusus untuk biaya serangan fajar ini. Padahal seorang calon legislatif rata – rata perlu 5.000 sampai 15.000 suara untuk bisa lolos duduk menjadi anggota DPRD Kota Surabaya.

Politik uang yang menjadi salah satu dampak serius terhadap kepercayaan masyarakat itu sejatinya telah di tolak oleh sebagian masyarakat di Kota Surabaya, akan tetapi banyak masyarakat di Kota Surabaya yang malah berharap adanya praktek Money Politic yang berwujud serangan fajar ataupun berupa bantuan sembako. Dan lebih parahnya lagi banyak masyarakat menjadikan momen pemilihan legislatif sebagai sarana untuk mendapatkan uang cepat dari para Caleg. Sehingga mereka akan menerima uang atau sembako pemberian dari para Caleg, walaupun para warga ini belum tentu memilih Caleg yang telah memberinya uang atau sesuatu. Hal ini terjadi karena warga akan memilih Caleg yang telah memberinya uang lebih besar dari pemberian Caleg lain.

Padahal sebenarnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memperkuat pengawasannya untuk mengurangi praktik politik uang. Mereka akan meningkatkan patroli pengawasan dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Selain itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) akan bertindak tegas terhadap pelaku dengan jerat pidana.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa pengawasan masih mengalami kebocoran, meskipun Bawaslu telah berupaya keras dengan sistem pengawasan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Mereka juga melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak kemana aliran dana kampanye secara lebih intensif.

Sementara itu akibat fenomena money politic yang makin menjamur ini tentunya memunculkan persepsi masyarakat yang beragam di Kota Surabaya. Hal ini di tandai dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada Sistem politik yang ada, mereka percaya bahwa proses pemilihan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, melainkan siapa yang memiliki lebih banyak uang untuk membeli suara. Salah seorang warga yang tinggal di Daerah Pemilihan atau Dapil 2 Surabaya mengatakan, "Saya merasa suara kita tidak ada artinya lagi, yang punya uang lebih banyak pasti menang tidak peduli dia punya kemampuan atau tidak".

Lebih lanjut, dikutip dari “Databoks”, persepsi masyarakat Surabaya terhadap praktik politik uang menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap fenomena tersebut. Survei yang dilakukan oleh Populi Center menunjukkan bahwa politik uang menjadi isu yang paling dikhawatirkan oleh 37,2% responden selama pemilu 2024. Kekhawatiran ini disebabkan oleh potensi dampak negatif politik uang terhadap integritas dan kejujuran pemilu. Sebagian banyak masyarakat yang dihadapkan pada tawaran politik uang cenderung menerimanya, meskipun ada kesadaran bahwa tindakan ini merugikan proses demokrasi. Ini menunjukkan adanya kontradiksi antara kesadaran akan dampak negatif dan perilaku aktual di lapangan.

Dan yang tidak kalah penting adalah adanya norma sosial yang menyimpang, beberapa warga menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah “normal” atau sudah menjadi bagian dari budaya pemilu. Hal ini menunjukkan pergeseran norma sosial yang menganggap tindakan korup seperti ini sebagai sesuatu yang biasa. Hal ini di pertegas oleh keterangan dari seorang tokoh masyarakat yang tinggal di daerah Kenjeran, “Semua orang tahu bahwa politik uang itu ada dan terjadi, tetapi banyak yang menganggapnya sebagai bagian dari permainan. Soalnya kalau melakukan itu (politik uang) maka seorang caleg akan sulit bersaing atau menang”.

Hal ini karena adanya faktor keterlibatan ekonomi, bagi warga dengan ekonomi rendah, politik uang sering kali dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang cepat atau jangka pendek. Mereka cenderung menerima uang atau barang dari kandidat calon tertentu karena kebutuhan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit, kesenjangan sosial, biaya kampanye yang tinggi, dan kurangnya pendidikan politik serta penegakan hukum yang lemah semuanya berkontribusi pada penyebaran politik uang.

Dengan demikian, untuk mengatasi politik uang, perlu dilakukan upaya yang komprehensif yang mencakup peningkatan kepercayaan pada sistem politik, perubahan norma sosial yang mendorong tindakan korup, serta peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan pendidikan politik yang lebih baik. Selain itu, penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran politik uang juga menjadi kunci dalam memastikan integritas proses demokrasi.

Sementara itu dibalik praktek politik dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Legislatif pasti akan menimbulkan dampak terhadap tatanan demokrasi, dampak di kota Surabaya pada khususnya. Dampak – dampak ini bisa saja terjadi, beberapa contoh kasus adalah merosotnya kepercayaan publik. Politik uang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Banyak warga Surabaya yang khawatir akan integritas pemilu karena praktik politik uang dianggap dapat mempengaruhi hasil secara tidak adil. Hal ini terlihat dari survei yang menunjukkan bahwa 37,2% responden sangat mengkhawatirkan politik uang selama pemilu 2024.

Ketidaksetaraan dalam Kompetisi, politik uang memberikan keuntungan tidak adil bagi kandidat yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Ini membuat proses pemilihan tidak setara dan menguntungkan mereka yang mampu membeli suara, bukan mereka yang memiliki program atau kemampuan terbaik untuk memimpin. Belum lagi munculnya dampak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kandidat yang menang melalui politik uang cenderung terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengembalikan investasi mereka. Ini bisa berujung pada kebijakan publik yang tidak menguntungkan masyarakat luas dan merugikan pembangunan kota dalam jangka panjang.

Namun apakah praktek politik uang ini benar adanya muncul di tengah masyarakat kota Surabaya?. Pertanyaan ini tentunya harus di carikan data yang tepat dan kompeten.

Beberapa contoh praktek politik uang berdasarkan laporan warga antara lain, Pembagian Uang Tunai, Caleg atau tim kampanye mereka mendekati pemilih dan memberikan uang tunai secara langsung sebagai imbalan untuk memberikan suara atau dukungan kepada calon tersebut.

Pemberian hadiah materi atau barang, selain uang tunai, calon atau partai politik juga dapat memberikan hadiah materi seperti sembako, barang elektronik, atau barang konsumsi lainnya sebagai imbalan untuk dukungan pemilih.

Adalagi yaitu dalam bentuk pembayaran biaya Transportasi atau pendaftaran, Calon atau tim kampanye mereka dapat membayar biaya transportasi atau biaya pendaftaran untuk pemilih yang berkomitmen untuk memberikan suara atau hadir dalam acara kampanye mereka. Operasi pemungutan suara juga sangat marak terjadi, praktek politik uang juga dapat terjadi di tempat pemungutan suara, di mana pemilih diberikan imbalan setelah memberikan bukti bahwa mereka telah memberikan suara kepada calon tertentu.

Politik uang yang terjadi di Kota Surabaya ini memang mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surabaya yang tinggal di daerah pemilihan atau Dapil 2. Dan berikut beberapa pernyataan atau statement dari warga bagaimana menanggapi fenomena politik uang dalam bentuk Serangan Fajar. Pendapat warga masyarakat ini kami dapatkan karena saya memang terjun langsung di wilayah Dapil 2 Kota Surabaya pada saat pemilihan legislatif Pemilu 2024.

1. Pernyataan dari seorang Ketua RT di wilayah Tenggumung Baru, “Warga sini sebagian besar akan memilih Caleg yang memberikan serangan fajar dalam bentuk uang amplop, kalau tidak ada uang itu jangan harap bisa meraup suara di wilayah RT ini”.
2. Ada juga keterangan seorang warga yang tinggal di wilayah Wonokusumo Surabaya, “Kalau mau saya pilih atau coblos, apa yang Caleg berikan untuk saya?, karena terus terang saya tidak mengenal para Caleg – caleg itu”.
3. Salah seorang Ketua RW di wilayah Pacar Keling Surabaya memberikan pendapat beberapa waktu sebelum Pemilu Legislatif 2024 di laksanakan, “Seorang Caleg, kalau mau dapat suara atau dipilih, langsung saja berikan uang atau amplop yang berikan uang dan contoh kertas suara. Jadi jangan melakukan pendekatan lain selain memberikan uang kepada warga, misalnya memberikan program bantuan alat fasilitas umum, sembako atau apapun. Warga sini mayoritas uang yang di utamakan”.

Pernyataan-pernyataan ini menggambarkan secara konkret tentang bagaimana politik uang atau serangan fajar terjadi di lapangan, khususnya di wilayah Dapil 2, Kota Surabaya.

Laporan tentang praktek politik uang dapat memberikan wawasan yang berharga tentang seberapa luas dan seriusnya fenomena ini dalam suatu PEMILU. Informasi yang diberikan oleh masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran hukum serta memperkuat integritas dan transparansi dalam proses demokrasi.

Beberapa data kasus laporan adanya praktek politik uang yang di himpun dari laman resmi BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan di release di media massa antara lain:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima sedikitnya dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024. Dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh seorang warga, dan dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif. Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp. 150.000.-. Dan dugaan pelanggaran itu saat ini masih didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. Untuk dugaan pelanggaran lainnya diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial

media, yang dilakukan oleh terduga tim sukses incumbent anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu. Bawaslu setempat tentunya masih mengumpulkan bukti untuk memperkuat temuan yang ada. Jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi, tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya.

2. Aliansi Madura Indonesia (AMI) memberikan laporan adanya 4 kasus dugaan adanya politik uang pada Pemilu 2024 yang dilakukan oleh para caleg dan melibatkan petugas KPPS ke Bawaslu Surabaya.

a. Laporan pertama di tujukan kepada 3 caleg dari PKB, yakni caleg DPR RI nomor urut 2 Dapil Jatim 1, Caleg DPRD Provinsi nomor urut 1, dan Caleg DPRD Surabaya dari PDIP. Di mana salah satu tim sukses 3 kandidat caleg tersebut di duga melakukan politik uang. Salah satunya dengan mendatangi pengurus AMI yang berada di daerah Kedinding, Tambak Wedi Tengah, berupa uang pecahan Rp. 100.000.- dan Rp. 50.000.- di dalam amplop dan diberikan spesimen contoh surat suara.

b. Laporan kedua dugaan politik uang mencapai puluhan juta rupiah, dilakukan oleh 2 orang Caleg DPRD Jatim dan Caleg DPRD Surabaya dari partai PKB.

Dugaan politik uang sebesar Rp. 22.350.000.-, di mana ada data rekap dan data pemilih yang harusnya tidak tersebar ke timses.

c. Laporan ketiga yaitu adanya barang bukti foto dan video dugaan politik uang. Salah satunya ada keterlibatan petugas KPPS, ada inisial SJ sebagai tim koordinator PKB tim pemenangan atas nama M dan JA. Lalu IEC sebagai tim pemenangan PKB atas nama M dan JA. MR anggota KPPS TPS 77 Jalan Tambak Asri Krembangan Sepatu dan MJ Ketua KPPS TPS 114 Morokrembangan.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Surabaya Eko Rinda memberikan pernyataan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti dan memanggil para pelapor untuk dimintai klarifikasi untuk mencocokkan kebenaran laporan dengan apa yang disampaikan.

Lalu bagaimana peran masyarakat dalam menanggulangi politik uang, hal ini tentu mencakup bentuk upaya yang bisa dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat untuk mencegah, melaporkan, dan memerangi Tindakan praktik politik uang dalam pemilu?. Berikut adalah beberapa contoh atau cara masyarakat dapat berperan dalam menanggulangi politik uang :

1. Pendidikan dan Kesadaran Politik: Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pendidikan dan kesadaran berpolitik yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya politik uang dan pentingnya integritas pemilu. Edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, diskusi, kampanye di media sosial, dan program Pendidikan bagi pemilih.

2. Pelaporan dan Pengawasan: Masyarakat tentunya bisa berperan aktif dalam melaporkan kasus politik uang kepada lembaga penegak hukum atau Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

3. Advokasi dan Kampanye Anti Politik Uang: Masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam kampanye anti-politik uang yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media.

Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi pemilih, menekan partai politik, dan mendesak pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik politik uang.

4. Pembentukan Komunitas Anti Politik Uang: Komunitas atau kelompok warga dapat dibentuk untuk mengadakan kegiatan secara Bersama - sama yang mempunyai tujuan untuk mencegah politik uang.

Komunitas ini dapat menjadi sumber informasi dan koordinasi untuk melaporkan pelanggaran serta memberikan dukungan kepada korban politik uang.

Disamping itu hal yang penting lain adalah bagaimana kita memberikan pemahaman edukasi dampak negatif politik uang di dunia Pendidikan, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan, mengenai konsekuensi buruk dari praktik politik uang.

Tujuan dari edukasi ini adalah untuk bagaimana meningkatkan kesadaran bahaya politik uang dan mendorong tindakan proaktif dalam memerangnya. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai makna dan pentingnya edukasi dampak negatif politik uang di dunia pendidikan:

1. Pembentukan Nilai-Nilai Moral dan Etika: Edukasi ini membantu membentuk nilai-nilai moral dan atau etika yang kuat di kalangan siswa dan mahasiswa. Dengan memahami bahwa politik uang adalah bentuk korupsi, generasi muda dapat mengembangkan sikap yang menolak segala bentuk kecurangan dalam kehidupan sehari-hari dan karier mereka di masa depan.
2. Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Politik: Melalui edukasi, siswa dan mahasiswa dapat menjadi lebih paham akan pentingnya partisipasi politik yang bersih dan adil. Mereka diajarkan untuk memahami peran mereka sebagai pemilih yang berintegritas dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk pemilu yang bebas dari korupsi.
3. Pencegahan Budaya Korupsi Sejak Dini: Dengan memberikan pengetahuan tentang dampak negatif politik uang, institusi pendidikan dapat mencegah terbentuknya budaya korupsi sejak dini. Siswa dan mahasiswa yang teredukasi tentang bahaya korupsi cenderung akan menolak praktik-praktik tidak etis dalam kehidupan profesional mereka di masa depan.
4. Dampak Langsung pada Kualitas Pendidikan: Edukasi tentang politik uang juga mencakup pemahaman tentang bagaimana korupsi dapat merusak kualitas pendidikan itu sendiri. Misalnya, alokasi dana pendidikan yang tidak tepat sasaran karena korupsi dapat mengakibatkan fasilitas pendidikan yang buruk dan rendahnya kualitas pengajaran.

Sehingga edukasi mengenai dampak negatif politik uang di dunia pendidikan bertujuan untuk membangun generasi yang lebih sadar, kritis, dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan sistem politik dan pendidikan yang bersih dan transparan.

Kemudian apa yang bisa menjadikan rekomendasi untuk mengatasi atau minimal meminimalisir terjadinya praktek tindak politik uang di Kota Surabaya.

Beberapa hal yang bisa menjadi rekomendasi untuk mengatasi politik uang yang marak terjadi terutama di kota Surabaya adalah:

1. Pendidikan Politik, meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat untuk menyadarkan dampak negatif politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi dan kapabilitas kandidat. Pendidikan politik adalah strategi yang efektif untuk mengatasi politik uang dalam pemilu. Dengan meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban pemilih, mengajarkan nilai-nilai demokrasi, menyediakan informasi yang akurat tentang kandidat, mengembangkan keterampilan kritis dan analitis, serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, pendidikan politik dapat membantu menciptakan pemilu yang lebih bersih, adil, dan

demokratis. Inisiatif ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media untuk mencapai dampak yang luas dan berkelanjutan.

2. Penegakan hukum yang ketat. Perlu ada penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik politik uang, tentunya dengan sanksi yang lebih jelas dan tegas bagi yang terlibat. Penegakan hukum yang ketat merupakan komponen kunci dalam upaya mengatasi politik uang. Ini mencakup pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, pengawasan ketat selama proses pemilu, penyelidikan dan penuntutan yang transparan, serta kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga non-pemerintah.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan tegas, penegakan hukum dapat mengurangi praktik politik uang, memperkuat integritas pemilu, dan mendukung perkembangan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

3. Adanya transparansi dan pengawasan. Meningkatkan transparansi dalam proses pemilu dan memperkuat pengawasan oleh lembaga independen serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Transparansi dan pengawasan yang ketat adalah langkah penting dalam mengatasi politik uang. Dengan menerapkan pelaporan keuangan yang terbuka, menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi, memperkuat lembaga pengawas, melibatkan masyarakat, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, dan menerapkan sanksi yang tegas, praktik politik uang dapat dikurangi secara signifikan. Langkah-langkah ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pemilu, masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk memastikan pemilu yang bersih dan demokratis.

Dengan memahami pandangan masyarakat secara kualitatif, kita dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan intervensi untuk memperkuat tatanan demokrasi dan memerangi politik uang di Surabaya.

KESIMPULAN

Bahwa fenomena politik uang memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap sistem demokrasi. Masyarakat cenderung merasa tidak percaya pada sistem politik yang ada karena mereka melihat politik uang merusak integritas pemilu. Norma sosial yang menganggap politik uang sebagai hal biasa semakin memperburuk keadaan. Ekonomi yang sulit juga membuat masyarakat lebih mudah tergoda oleh tawaran politik uang.

Dampak politik uang terhadap tatanan demokrasi di Surabaya sangat signifikan. Kualitas pemimpin menurun karena yang terpilih seringkali adalah mereka yang memiliki dana besar, bukan yang kompeten. Proses demokrasi menjadi tidak murni karena prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan transparansi tergantikan oleh transaksi uang. Partisipasi politik yang sehat juga menurun, dan nilai demokratis seperti kejujuran dan keadilan tergerus.

Modalitas caleg dalam memenangkan pemilihan legislatif menunjukkan bahwa dana kampanye memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Biaya kampanye yang tinggi mencakup berbagai aspek, mulai dari akomodasi hingga biaya saksi dan serangan fajar, yang memperlihatkan betapa besar pengaruh uang dalam pemilihan.

Laporan warga menunjukkan bahwa praktek politik uang memang nyata terjadi di Surabaya, dengan berbagai bentuk pemberian uang dan barang oleh caleg kepada pemilih. Ini mengindikasikan adanya masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Peran masyarakat dalam menanggulangi politik uang sangat krusial.

Edukasi mengenai dampak negatif politik uang di dunia pendidikan bertujuan untuk membentuk generasi yang lebih sadar, kritis, dan berintegritas tinggi.

SARAN

Dari pokok bahasan dan kesimpulan, bisa di tarik beberapa hal yang diharapkan bisa di jadikan saran dan masukkan untuk kehidupan berdemokrasi yang baik, khusus nya di wilayah Kota Surabaya, antara lain adalah:

1. Meningkatkan Pendidikan Politik: Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menyelenggarakan program pendidikan politik yang menyeluruh bagi masyarakat. Ini termasuk pemahaman mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan bagaimana politik uang merusak demokrasi.
2. Penegakan Hukum yang Ketat: Lembaga penegak hukum perlu memperkuat upaya dalam menangani kasus politik uang dengan sanksi yang tegas dan jelas. Ini juga mencakup pengawasan yang lebih ketat selama proses pemilu.
3. Peningkatan Kondisi Ekonomi: Upaya mengatasi politik uang juga harus mencakup peningkatan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan ekonomi yang lebih baik, masyarakat tidak mudah tergoda oleh iming-iming uang dari para caleg.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan politik uang dapat diminimalkan sehingga proses demokrasi menjadi lebih adil, transparan, dan representatif.

DAFTAR PUSAKA

- Buku karya - Mada Sukmajati dan Edward Aspinall - Mengenai Politik uang di Indonesia pada pemilu legislatif 2014.
- Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2016) - "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots".
- Burhanuddin Muhtadi (2019) - "Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery".
- Yoes C. Kenawas (2018) - "Money Politics and Electoral Corruption in Indonesia: The Role of Candidates and Voters".
- Rini Astuti (2019) - "The Political Economy of Vote Buying in Indonesia's Local Elections".
- SuaraSurabaya.net - Bawaslu Diminta Awasi Politik Uang di Pemilu 2024 - oleh Meilita Elaine.
- tirto.id - Strategi Bawaslu Cegah Politik Uang pada Pemilu 2024 - Fransiskus Adryanto Pratama.
- Databoks - Praktik Politik Uang Jadi Hal yang Paling Dikhawatirkan Publik saat Pemilu - Nabilah Muhamad.
- Kuskridho Ambardi. (2016). "Politik Dana Pemilu: Pengaruh Modalitas Dana Kampanye Terhadap Praktik Politik di Indonesia." Penerbit Buku Kompas.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). "Risalah Pemilihan Umum Legislatif 2019".
- Laimer, M. M. (2013). "Kandidat, Kampanye, dan Pengaruh Uang dalam Pemilihan Umum." Pustaka Pelajar.
- Kantor berita Antara.
- Artikel detikjatim, "Aliansi Warga Laporkan 4 Dugaan Money Politics Caleg di Surabaya ke Bawaslu".
- Budiardjo, Miriam. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama).
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (2019). "Manual for Election Observers." Perludem).
- Kemitraan untuk Pemilu yang Bebas dan Adil (PERLUDEM). (2018). "Elections and Money in Indonesia: Keeping Elections Clean." PERLUDEM).
- Prasetyo, Eko. (2016). Politik Uang di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia).
- Simanjuntak, David. (2019). "Edukasi Anti Korupsi di Lingkungan Pendidikan." Jurnal Pendidikan Karakter).
- Budiardjo, Miriam. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama).
- Haryanto, Ignatius. (2015). "Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu: Studi Kasus pada Pemilu 2014." Jurnal Pemilu dan Demokrasi).